PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM MENDORONG PENGEMBANGAN PARIWISATA AIR TERJUN TIMBULUN DI KOTA PADANG

Iqnur Hafizh Syafikruzi[1], Fitri Eriyanti[2]

[1,2]*Universitas Negeri Padang*
E-mail : [1]iqnurhafis@gmail.com, [2]fitri.eriyanti@fis.unp.ac.id

ABSTRAK

Pengembangan pariwisata berbasis alam seperti Air Terjun Timbulun di Kota Padang menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, partisipasi masyarakat rendah, minim promosi digital, dan pengembangan manfaat ekonomi yang belum merata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemangku kepentingan, yaitu Dinas Pariwisata Kota Padang, Kelurahan Bungus Timur, dan Pokdarwis "Timbulun Indah" dalam mendorong pengembangan destinasi Air Terjun Timbulun. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan sebagai teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara dengan pemangku kepentingan, serta menganalisis dokumen terkait data kunjungan wisatawan tahun 2024-2025. Hasil menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata berperasn sebagai perumus kebijakan, promosi digital, dan pelatihan. Namun, terhambat oleh keterbatasan anggaran dan koordinasi. Kelurahan Bungus Timur berfungsi sebagai penghubung administratif dan komunikasih, serta pendukung infrastruktur, tetapi perannya masih terbatas pada fasilitas. Pokdarwis "Timbulun Indah" menjadi penggerak komunitas melalui pengelolaan harian, promosi media sosial, dan pelibatan masyarakat, meskipun masih menghadapi kendala dalam kelembagaan dan sumber daya. Kerja sama antat pemangku kepentingan belum optimal, menyebabkan pengembangan belum berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlunya kerja sama yang terpadu dalam meningkatkan aksesibilitas, kapasitas, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Rekomendasi mencakup penguatan koordinasi, alokasi anggaran dan pelatihan berkelanjutan.

Kata Kunci : *Perna, Pemangku Kepentingan, Air Terjun Timbulun*

ABSTRACT

The development of nature-based tourism, such as Air Terjun Timbulun in Padang City, faces challenges including limited infrastructure, low community participation, minimal digital promotion, and uneven distribution of economic benefits. This study aims to analyze the roles of key stakeholders (namely the Padang City Tourism Office, Bungus Timur Village, and Pokdarwis "Timbulun Indah") in promoting the development of the Air Terjun Timbulun destination. A qualitative descriptive approach was employed, with data collected through field observations, in-depth interviews with stakeholders, and analysis of documents related to tourist visitation data for 2024–2025. The findings reveal that the Padang City Tourism Office serves as the primary policy maker, digital promoter, and provider of training programs. However, its efforts are constrained by budget limitations and coordination issues. Bungus Timur Village functions as an administrative liaison and facilitator of basic infrastructure, yet its role remains limited to supportive facilitation. Pokdarwis "Timbulun Indah" acts as the main community driver through daily site management, social media promotion, and local community involvement, although it still faces institutional and resource constraints. Inter-stakeholder collaboration remains suboptimal, resulting in unsustainable tourism development. The study concludes that integrated cooperation is essential to enhance accessibility, capacity building, and equitable economic benefits for the local community. Recommendations include strengthening coordination mechanisms, allocating adequate budgets, and ensuring continuous training programs.

Keywords : *Role, Stakeholders, Timbulun Waterfall*

PENDAHULUAN

Pariwisata alam merupakan salah satu sektor unggul dalam pebangunan ekonomi daerah indonesia, khusudnya di wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah seperti Sumatera Barat. Kota Padang, sebagai ibu kota provinsi, memiliki dereran pasisir sepanjang 68,126 km, pulau-pulau kecil, serta kawasan bukit barisan yang mendukung destinasi wisata berbasis alam, salah satunya Air Terjun Timbulun di Kelurahan Bungus Timur. Destinasi ini menawarkan pemandangan alam yang asri, suasana dingin pegunungan, dan akses yang relatif mudah melalui trekking singkat sekitar 10 menit dari area parkir, sehingga potensi bagi wisatawan pecinta petualangan dan ekowisata.

Namun, pengembangan pariwisata di Air Terjun Timbulun masih menghadapi berbagai tantangan baik secara struktural maupun sosial. Observasi awal menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar jalan telah dibeton, terdapat sekitar 20 meter jalur tanah yang yang masih belum di beton dan kurang nyaman, ditambah minimnya fasilitas pendukung seperti toilet umum, tempat istirahat, papan petunjuk, dan sistem pengelolaan sampah. Selain itu, partisipasi masyarakat lokal masih rendah dan bersifal parsial, di mana warga hanya terlibat pada kegiatan besar tanpa pemberdayaan menyeluruh sejak tahap perencanaan. Minimnyaa promosi digital menyebabkan destinasi ini kurang dikenal, meskipun era digital telah mengubah pola pencarian informasi wisatawan (Kumar et al., 2023). Penyaluran pemanfaatan ekonomi juga belum merata. Data kunjungan Pokdarwis "Timbulun Indah" mencatat 1.893 pengunjung pada 2024 dan hanyaa 420 pengunjung dari januari hingga mei 2025. Hal ini menandakan potnsi yang belum tergapai optimal.

Secara teoritis, pengembangan pariwisata berkelanjutan tergantung pada kolaborasi aktif antar pemangku kepentingan, sehingga dikemukakan Freeman dan Reed (1983) yang mendefinisikan pemangku kepentingan sebagai individu atau kelompok yang dapat memngaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi/lembaga. Dalam kontek pariwisata alam, (Wondirat, et al. 2021) menekankan bahwa kerja sama antar pemerintah, komunitas kelompok, dan kelompok masyarakat menjadi kunci keberlanjutan, karena mampu menyatukan aspek ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Partisipasi masyarakat rendah menjadi penghambar utama dalam pengelolaan ekowisata, dan penguatan kapasitas melalui pelatihan serta pembangunan infrastruktur sosial diperlukan untuk menciptakan hubungan antara pemangku kepentingan. Pokdarwis berperan penting sebagai enggerak pengelolaan berkelanjutan, tetapi memerlukan motivasi dan dukungan pemangku kepentingan seperti Dinas Pariwisata Kota Padang dan Kelurahan Bungus Timur agaar lebih aktif (ACAdlore, 2023). Penelitian lain juga membahas bahwa peran ganda pemerintah daerah dan pokdarwis dalam pengembangan objek wisata Air Terjun, di mana kolaborasi yang lemah menghambat optimalisasi potensi destinasi

Berdasarkan kajian teori, pariwisata di Indonesia khususnya Sumatera Barat secara umum menunjukkan fokus pada potensi alam seperti Lembah Anai atau Puncak Lawang, tetapi sedikit yang secara spesifik menganalisis kerja sama pemangku kepentingan di destinasi Air Terjun kecil seperti Timbulun (Rahma dkk., 2025). Kurangnya integrasi peran antara Dinas Pariwisata sebagai regulator, kelurahan sebagai fasilitator administrasi, dan Pokdarwis sebgai aktor lapangan, yang sering kali terpisah dan tidak kolaboratif (Deanova & Syafril, 2024). Penelitian lain menegaskan bahwa pengembangan pariwisata berbasis komunitas di desa wisata atau destinasi alam memerlukan keterlibatan peran pemangku kepentingan yang kuat untuk mengatasi keterbatasan sumber daya dan partisipasi rendah (Suranny, 2023; Fifiyanti & Damanik, 2021; Damanik, 2016). oleh karena itu pada penelitian ini menganalisis peran pemangku kepentingan utama di Air Terjun

Timbulun yaitu Dinas Pariwisata Kota Padang, Kelurahan Bungus Timur, dan Pokdarwis "Timbulun Indah".

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah data berupa kata-kata, kalimat, maupun paragraf. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer merupakan informasi yang diperoleh peneliti langsung dan datasekundermerupakan data yang diperoleh dari pihak lain atau sumber yang sudah ada (Barlian, 2018).

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara, studi dokumentasi, dan observasi. Wawancara yang dilakukan merupakan bentuk diskusi atau percakapan antara dua orang atau lebih yang dilakukan dengan tujuan tertentu. Wawan cara dilakukan dengan pihak-pihak yang dianggap memiliki pengetahuan, keterlibatan, serta otoritas terhadap objek penelitian, yaitu Dinas Pariwisata Kota Padang, Kelurahan Bungus Timur, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) "Timbulun Indah", masyarakat sekitar, serta wisatawan yang bekunjung. Kemudian studi dokumentasi, data dokumentasi meliputi profil resmi objek wisata Air Terjun Timbulun, program kerja dan kebijakan Dinas Pariwisata Kota Padang, laporan kegiatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), serta berbagai publikasi media masa atau literasi ilmiah yang relevan. (Fuad & Sapto, 2013). Dan observasi dilakukan dengan cara mengamati langsung kondisi nyata objek penelitian. observasi dilakukan di kawasan wisata Air Terjun Timbulun Kota Padang. Hasil observasi ini dicatat secara sistematis dalam catatan lapangan serta didokumentasikan melalui foto dan video, sehingga dapat mendukung data hasil wawancara dan studi dokumentasi.

Selanjutnya teknik penjamin keabsahan data penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Teknik ini dilakukan dengan cara membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informasi dan data yang diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data. Kemudian teknik analisis data meliputi tiga tahap yaitu, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara menyeleksi informasi yang berkaitan dengan upaya pemangku kepentingans (Dinas Pariwisata, Pokdarwis, masyarakat, dan wisatawan) dalam pengembangan Air Terjun Timbulun, serta faktor pendukung dan penghambatnya. Penyajian data berfokus pada uraian mengenai peran, strategi, serta hambatan yang dihadapi pemangku kepentingans dalam mendorong pengembangan pariwisata Air Terjun Timbulun. (Sugiono, 2014).

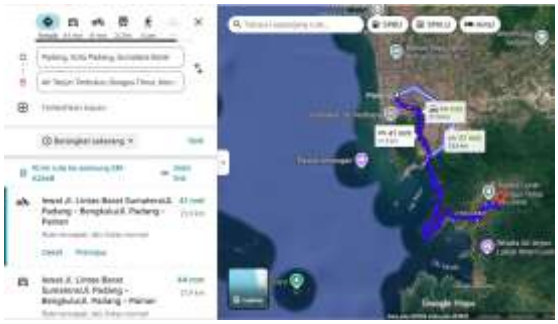
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan analisis data dari observasi, wawancara dan dokumentasi, temuan penelitian dibagi menjadi temuan umum (gambaran keseluruhan pengembangan pariwisata) dan temuan khusus (rincian peran masing-masing pemangku kepentingan). Temuan ini mencerminkan kondisi pengelolaan Air Terjun Timbulun yang belum optimal, meskipun ada upaya dari pemangku kepentingan.

Temuan Umum

Objek wisata Air Terjun Timbulun terletak di Kelurahan Bungus Timur, Kota Padang, Sumater Barat. Secara umum kondisi geografis Air Terjun Timbulun mendukung pariwisata alam karena lokasi yang mudah di akses, kondisi alam yang asri dan panorama alam yang menarik. Lokasi objek wisata ini terletak 21,9 km dari Ibu Kota Sumatera Barat, Padang. Waktu yang dibutuhkan untuk mempuh pejalanan ke lokasi kurang dari satu jam. Berdasarkan Gambar 1 dapat dilihat data lokasi Air Terjun Timbulun.



Gambar 1. Informasi Lokasi Air Terjun Timbulun

Lokasi air terjun ini relatif dekat dengan perumahan masyarakat serta dapat diakses dengan sepeda motor hingga lokasi parkir. Namun begitu, kondisi permukaan tanah yang berbukit dan sebagian akses jalan yang belum sepenuhnya dibeton masih menjadi hambatan dalam peningkatan kenyamanan dan keselamatan wisatawan. Hal ini membuktikan bahwa secara geografis lokasi ini tidak hanya menjadi potensi, akan tetapi juga memerlukan dukungan kebijakan dan pembangunan infrastruktur agar dapat dimanfaatkan agar mencapai hasil yang optimal.

Keindahan air terjun menjadi pusat utama dari objek wisata ini, pesona alam yang diberikan berupa aliran air yang jernih, lingkungan yang masih alami dan suasana yang sejuk dan terang. Akan tetapi Air Terjun ini masih memiliki keterbatasan jika dilihat dari sisi penunjang, seperti toilet, papan penunjuk aarah, tempat istirahat, dan sistem keamanan wisata yang belum tersedia secara memadai seperti Gambar 2.



Gambar 2. Lokasi Sekitar Air Terjun Timbulun

Berdasarkan data Pokdarwis "Timbulun Indah", jumlah pengunjung Air Terjun Timbulun pada taahun 2024 tercataat sebanyak 1.893 orang. Sementara itu pada periode januari hingga mei

2025 jumlah pengunjung tercatat sebanyak 420 orang. Data ini menjadi tolak ukur bahwa Air Terjun Timbulun memiliki potensi sebagai objek wisata yang cukup baik, namun masih memerlukan pengelolaan dan promosi yang lebih optimal agar jumlah kunjungan dapat terus meningkat secara berkelanjutan, sehingga memberikan manfaat di bidang sosial, ekonomi serta lingkungan bagi daerah sekitar.

Temuan Khusus

1. Peran Dinas Pariwisata Kota Padang

Berdasarkan hasil wawancara Dinas Pariwisata telah melaksanakan perannya, melalui kegiatan perencanaan, pendataan, observasi lokasi, promosi dan peningkatan SDM melalui pelatihan. Program seperti SIDETA, konten digital, dan pendampingan Pokdarwis telah berjalan. Namun, belum optimal karena keterbatasan anggaran, masalah kepemilikan lahan akses, dan tantangan membangun pemahaman serta partisipasi masyarakat.

2. Peran Kelurahan Bungus Timur

Begitu juga dengan Kelurahan Bungus Timur telah menjalankan perannya sebagai fasilitatif dan administratif: menjembatani komunikasi masyarakat-pemerintah, fasilitasi perencanaan akses, tampung aspirasi dan keluhan. Program padat karya telah membuka akses alternatif. Namun, terbatas oleh kewenangan dan sumber daya, sehingga kontribusi belum maksimal dalam memutuskan keputusan yang strategis.

3. Peran Pokdarwis "Timbulun Indah"

Berdasarkan hasil wawancara pokdarwis berperan langsung ke lapangan sebagai pengelola harian objek wisata, promosi destinasi, pelibatan masyarakat sekitar melalui kebersihan dan UKM. Kegiatan seperti "Timbulun Clean-Up" dan promosi media sosial berjalan. Namun, belum optimal karena keterbatasan anggaran, SDM, sarana prasarana, dan koordinasi dengan pemangku kepentingan lain.

4. Kerja Sama Antar Pemangku Kepentingan

Koordinasi antara Dinas, Kelurahan, Pokdarwis, dan masyarakat masih parsial, belum terintegrasi dalam perencanaan terpadu. Hal ini menyebabkan potensi pariwisata belum dikembangkan maksimal dan berkelanjutan.

Pembahasan

Perencanaan pengembangan pariwisata Air Terjun Timbulun masih bersifat parsial, dengan Dinas Pariwisata memegang peran utama dalam merumuskan kebijakan dan program, sementara Kelurahan Bungus Timur dan Pokdarwis "Timbulun Indah" cenderung mengikuti arah tanpa keterlibatan aktif sejak tahap perumusan. Kondisi ini menyebabkan program yang dirancang belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi lapangan dan kebutuhan masyarakat lokal. Hal ini sejalan dengan temuan Deanova dan Syafril (2024) yang menyatakan bahwa pengembangan wisata menjadi kurang efektif ketika Pokdarwis hanya dilibatkan pada tahap pelaksanaan, bukan pada perumusan rencana. Demikian pula, Byrd (2007) menekankan bahwa keterlibatan stakeholder sejak awal perencanaan merupakan syarat penting untuk keberlanjutan pariwisata. Akibatnya, perencanaan yang belum kolaboratif menjadi salah satu faktor utama mengapa pengembangan destinasi belum berjalan optimal.

Dalam aspek fasilitasi dan dukungan, Dinas Pariwisata telah menjalankan peran sebagai fasilitator melalui pembinaan, arahan teknis, dan program pelatihan, namun pelaksanaannya belum rutin, menyeluruh, dan tepat sasaran. Kelurahan lebih berfungsi administratif, sedangkan Pokdarwis hanya menerima fasilitasi terbatas, seperti sosialisasi dan dukungan moral, tanpa penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan yang memadai. Situasi ini sesuai dengan penelitian

Amalillah dkk, (2024) yang menunjukkan bahwa fasilitasi pemerintah daerah sering terhambat keterbatasan anggaran dan fokus program, sehingga dampaknya belum dirasakan secara signifikan oleh pengelola wisata lokal. Selain itu, Hayati dkk,. (2022) menjelaskan bahwa fasilitasi yang tidak tepat sasaran sering kali tidak mampu meningkatkan kinerja pengelola lokal, sebagaimana terlihat pada minimnya pelatihan berkelanjutan bagi Pokdarwis di Air Terjun Timbulun.

Kurangnya fasilitas umum (toilet, penerangan, gazebo, dan akses jalan yang masih sebagian tanah serta milik masyarakat) menjadi permasalahan krusial yang menunjukkan peran pemangku kepentingan belum maksimal dalam memenuhi kebutuhan wisatawan. Pemerintah daerah seharusnya bertanggung jawab menyediakan sarana prasarana untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan mendukung ekonomi masyarakat, sebagaimana dijelaskan Hayati et al. (2022). Masalah kepemilikan lahan akses juga menimbulkan potensi konflik dan menghambat pembangunan infrastruktur, sehingga memerlukan peran pemerintah dalam pengaturan lahan dan kepastian hukum untuk pengembangan berkelanjutan, sebagaimana ditegaskan oleh Gustina dan Mussadun (2018) dalam konteks pengelolaan wisata pantai di Padang.

Promosi destinasi masih terbatas, dengan Dinas Pariwisata lebih aktif melalui kerja sama influencer dan media digital, sementara Pokdarwis dan kelurahan belum terlibat secara mandiri dan optimal. Keterlibatan masyarakat juga masih rendah, terbatas pada aktivitas ekonomi sederhana tanpa berkembang ke pengelolaan yang lebih efektif. Partisipasi masyarakat sulit meningkat tanpa penguatan kelembagaan Pokdarwis dan dukungan konsisten dari pemerintah (Deanova & Syafril, 2024; Saleh et al., 2024). Rahma et al. (2025) juga menyoroti bahwa promosi wisata alam sering tidak efektif karena kurangnya keterlibatan stakeholder lokal dan keterbatasan kapasitas dalam pengelolaan media promosi.

Secara keseluruhan, hubungan antar pemangku kepentingan telah terjalin namun masih bersifat formal dan terpisah, tanpa membentuk kolaborasi yang saling menguatkan dalam kerangka kerja jelas. Peran ketiga pihak telah berjalan, tetapi belum terintegrasi sesuai tujuan pengembangan pariwisata berkelanjutan. Temuan ini memperkuat penelitian terdahulu seperti Wondirad et al. (2021) dan Reed et al. (2023) bahwa keberhasilan pengembangan pariwisata alam tidak hanya bergantung pada potensi alam, melainkan pada kualitas hubungan kerja, fasilitasi, dan penguatan pemangku kepentingan lokal. Dengan demikian, masalah utama bukan ketiadaan peran, melainkan belum optimalnya keterpaduan peran antar pemangku kepentingan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran pemangku kepentingan (Dinas Pariwisata Kota Padang, Kelurahan Bungus Timur, dan Pokdarwis “Timbulun Indah”) dalam mendorong pengembangan pariwisata Air Terjun Timbulun telah berjalan melalui berbagai upaya perencanaan, fasilitasi, pengelolaan lapangan, dan promosi, namun belum mencapai optimalitas dan keberlanjutan yang diharapkan. Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun masing-masing pihak telah menjalankan fungsi sesuai peran dan kapasitasnya, keterpaduan peran antar pemangku kepentingan masih lemah, ditandai dengan perencanaan yang cenderung parsial, fasilitasi yang belum tepat sasaran, infrastruktur pendukung terbatas, promosi kurang, serta partisipasi masyarakat yang belum merata. Sehingga potensi wisata alam Air Terjun Timbulun belum dapat dikembangkan secara maksimal dan berkelanjutan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan mengembangkan studi lanjutan yang lebih mendalam pada strategi kolaborasi multi-stakeholder

atau analisis dampak ekonomi-sosial pengembangan destinasi serupa di wilayah perkotaan pesisir Sumatera Barat.

DAFTAR PUSTAKA

ACADlore. (2023). Role of Tourism Awareness Group in Development of Way Kalam Waterfall at Way Pisang Forest Management Unit, Lampung Province, Indonesia. Journal of Green Economy and Low-Carbon Development, 2(1).

Amalillah, P., Ellma, Ismandi, A. A., Al-Khoyr, A., Nurfaisal, R., Rahman, A. F., & Khairunnisa, H. (2024). Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Cirebon Dalam Pelestarian Budaya Lokal. Juparita, 157-166.

Barlian, I. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. Padang: UNP Press.

Byrd, E. T. (2007). Stakeholders in sustainable tourism development and their roles: Applying stakeholder theory to sustainable tourism development. Tourism Review, 62(2), 6-13.

Damanik, J. (2016). Lack of Stakeholder Partnerships in Destination Management: Lessons Learned from Labuan Bajo, Eastern Indonesia. Asian Journal of Tourism Research, 1(2), 173-198.

Deanova, C. M., & Syafril, R. (2024). Strategi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam Mengembangkan Objek Wisata Pemandian Air Terjun Lubuak Tampuruang Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH), 1929-1936.

Fifiyanti, D., & Damanik, J. (2021). Pemetaan peran dan kontribusi pemangku kepentingan dalam pengembangan ekowisata desa Burai. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 10(3), 448-462.

Freeman, R. E., & Reed, D. L. (1983). Stockholders and stakeholders: A new perspective on corporate governance. California Management Review, 25(3), 88–106. https://doi.org/10.2307/41165018

Fuad, & Sapto. (2013). Metodologi penelitian kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Gustina, R. D., & Mussadun, M. (2018). Peran pemangku kepentingan dalam pengelolaan wisata pantai di Kelurahan Air Manis, Kecamatan Padang Selatan. Jurnal Pengembangan Kota, 6(2), 144–154. https://doi.org/10.14710/jpk.6.2.144-154

Hayati, K. R., Nisak, I., Suyanto, A. S., & Bimantio, M. A. (2022). Peran Pemerintah Kelurahan Kebonsari Surabaya Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. JMIAP, 11-16.

Kumar, A., Syed, A. A., & Pandey, A. (2023). How does digital marketing enhance tourism industry performance? Role of tourism orientation and innovation capability. Journal of Hospitality and Tourism Insights. https://doi.org/10.1108/JHTI-11-2022-0552

Rahma, M. (2025). Strategi Pengembangan Pariwisata Alam di Puncak Lawang Kabupaten Agam. Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner, 2109-2116.

Reed, M. S., Vella, S., Challies, E., de Vente, J., Frewer, L., Hohenwallner-Ries, D., & van Delden, H. (2023). A theory of participation: What makes stakeholder and public engagement in environmental management work? Restoration Ecology, 31(2), e13768. https://doi.org/10.1111/rec.13768

Saleh, F., Kadir, B., & Latif, A. K. (2024). Pemberdayaan Pokdarwis Sebagai Penggerak Dan Pengembangan Pariwisata Di Desa Bulu Cindea Bungoro Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 98-106.

Sugiyono. (2014). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suranny, L. E. (2023). Analisis Pengembangan Desa Wisata Dan Peran Pemangku Kepentingan Di Kabupaten Wonogiri. UNS (Sebelas Maret University).

Wondirad, A., Tolkach, D., & King, B. (2021). Stakeholder collaboration as a major factor for sustainable ecotourism development in developing countries. Tourism Management, 82, 104181. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2020.104181